

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini sangat pesat, tantangan masyarakat juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Visibilitas dan reputasi online menjadi penentu pengambilan keputusan sosial, terutama dalam masa pandemi. Dalam era yang serba digital sekarang ini, tidak jarang banyak orang yang mulai belajar cara menjalankan bisnis secara online.

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada Indonesia karena melumpuhkan hampir semua rantai bisnis. Sektor mikro yang memasuki tahun kedua mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kehadiran pandemi Covid-19 membuat sektor mikro kesulitan mengatasi permodalannya. Pendanaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan dapat membantu UMKM bangkit dan menyerap tenaga kerja yang terputus selama pandemi berlangsung. Saat Indonesia dilanda krisis tahun 1997 hingga 1998, UMKM ternyata masih tangguh menghadapi badai ekonomi. Data BPS Indonesia mencatat penyerapan tenaga kerja di tahun 1997 ialah 57,4 juta (87,6%) perusahaan kecil, 7,7 juta (11,75%) perusahaan sedang, dan 0,0393 juta (0,61%) perusahaan besar. Sedangkan di tahun 1998 mencatat 57,34 juta (88,66%) perusahaan kecil, 6,9 juta (10,78%) perusahaan sedang dan 0,364 juta (0,56%) perusahaan besar. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Mikro (BPR) harus menjadi garda terdepan dalam mendukung sektor UMKM, terutama dalam memperkuat kapasitasnya dalam

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



membuka akses dana bagi sektor UMKM dalam mensejahterakan warga (Lusy dan Widyastuti, 2023).

UMKM merupakan salah satu peluang besar untuk merekrut tenaga kerja di daerah manapun. Proses ini pasti akan berkontribusi pada munculnya keadilan dan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya bisnis UMKM merupakan bidang yang sangat luas. Sektor UMKM sendiri dapat mencakup berbagai bidang. Pengembangan bisnis mulai dari fashion, pendidikan, kuliner, otomotif hingga produk kreatif. Semua bidang ini dapat digunakan sebagai tujuan bisnis yang menguntungkan yang selaras dengan keahlian dan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro. Pemerintah harus dengan cepat menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah ini untuk mengurangi angka kemiskinan negara. UMKM merupakan penopang utama perekonomian Indonesia dan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM dalam siaran pers Jakarta 5 Mei 2021, jumlah UMKM kini mencapai 64,2 juta, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). memberikan kontribusi 61,07% terhadap (PDB) atau Rp8.573,89 triliun dan merupakan penyerap tenaga kerja sebesar 97%. Seiring dengan pertumbuhan UMKM yang pesat dan berperan besar di Indonesia, UMKM dituntut untuk melakukan pembukuan keuangan yang baik dan akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Beberapa UMKM tidak memelihara catatan keuangan standar karena menganggap banyak bisnis masih kecil (Hermansyah dan Sutjahyani, 2023).



UMKM sering mengalami kesulitan dalam pertumbuhan dan pengembangannya karena ada kendala finansial dan non-finansial. Hambatan finansial yang sering terjadi adalah masalah modal, yang menyebabkan banyak UMKM kesulitan dalam mengelola keuangan perusahaan mereka. Sebagai akibatnya, bisnis tersebut tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari kreditur dalam hal pemberian pinjaman modal ventura, karena status keuangan perusahaan tidak diketahui secara jelas. Oleh karena itu, kreditur seringkali meremehkan bisnis tersebut (Soraya dan Mahmud, 2016).

Sebagian besar UMKM tutup atau gagal karena masih belum menerapkan akuntansi akibat kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi keuangan dan belum menyadari pentingnya menyusun laporan keuangan serta pembukuan yang terstruktur. Oleh karena itu, wajar jika banyak dari mereka yang tidak memiliki laporan keuangan untuk usahanya yang berpotensi untuk berkembang. Penerapan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang tepat, pelaku bisnis bisa mengetahui apakah bisnisnya sehat atau tidak. Akibatnya tidak dapat mengelola aset dan arus kas dengan baik, belum bisa membedakan keuangan pribadi dan bisnis usaha yang akan digunakan untuk modal selanjutnya, serta menjalankan bisnis berdasarkan catatan manual dan insting saja. Jikalau memiliki laporan keuangan yang berkualitas tinggi, akan memungkinkan UMKM untuk menganalisis kinerja operasi mereka sendiri. Ini akan membantu UMKM menentukan strategi yang mereka butuhkan untuk membuat bisnis mereka berkelanjutan. Urgensi dari penelitian ini adalah jika usaha kecil memiliki usaha yang berkelanjutan, mereka pasti dapat menciptakan lapangan kerja penuh waktu dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Lusy, *et al.*, 2022).



Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan yang dapat menjelaskan kinerja UMKM selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi tentang kinerja UMKM dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi sangat penting dalam menjalankan bisnis. Pelaporan keuangan UMKM memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha dan harus disusun dan dipersiapkan sejak awal pembentukan usaha. Data tentang pendapatan, pengeluaran, hutang yang dikeluarkan, dan piutang membantu menghitung margin dan memaksimalkan pengembalian keuangan perusahaan, juga dapat digunakan untuk menentukan posisi keuangan perusahaan sebagai bantuan pengambilan keputusan dan persyaratan untuk melamar atau menarik investor. Apabila tidak memiliki laporan keuangan maka akan membuat usahanya akan bangkrut karena data yang tidak sempurna dan kesulitan dalam menentukan kebijakan yang tepat terkait dengan penurunan keuangan. Para pelaku ekonomi tidak mengetahui berapa pajak yang harus dibayar, berapa untung dan rugi yang akan ditanggung dan yang diharapkan. Tanpa laporan keuangan yang baik, akan sulit mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan bisnis usaha UMKM.

Laporan keuangan UMKM merupakan catatan informasi keuangan perusahaan yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang kinerja UMKM selama satu periode akuntansi serta membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan bisnis, dan pelaporan keuangan UMKM dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun sejak awal pembentukan usaha. Data tentang pendapatan, pengeluaran, hutang dan



piutang membantu dalam menghitung margin dan memaksimalkan pengembalian keuangan perusahaan, serta dapat digunakan untuk menentukan posisi keuangan perusahaan sebagai bantuan pengambilan keputusan dan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman atau menarik investor.

Penyusunan laporan keuangan pada UMKM sangat penting untuk mengetahui jumlah aset, modal, dan hutang usaha. Semua biaya operasional harus dicatat dengan akurat dan jelas, termasuk biaya produksi dan operasi. Dalam hal ini, SAK EMKM merupakan standar laporan keuangan khusus untuk UMKM atau UKM yang disahkan langsung oleh Dewan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM serta dasar pengukurannya. Umumnya menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM tetap perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. Jika suatu usaha tidak memiliki laporan keuangan yang baik, akan sulit untuk menentukan tingkat aset, ekuitas, dan kewajibannya, dan hal ini dapat membuat usaha tersebut mengalami kebangkrutan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM sangat penting untuk mengetahui jumlah aset dan modal, juga menunjukkan jumlah hutang usaha sehingga pergerakan aset, ekuitas, dan liabilitas dipantau dengan jelas. Jika suatu usaha tidak memiliki laporan keuangan, akan sulit untuk menentukan tingkat aset, ekuitas, dan kewajibannya. Semua biaya operasional harus dicatat secara akurat dan jelas. Biaya yang diakui meliputi biaya produksi dan operasi. Karena adanya



laporan keuangan, rincian pengeluaran bisnis ini terpantau dengan jelas untuk jangka waktu tertentu. Seluruh rincian biaya yang dicatat dalam laporan keuangan untuk membantu UMKM dalam menentukan harga produksi dan menghitung laba/rugi.

Saat ini, di Indonesia sudah terdapat standar laporan keuangan khusus untuk UMKM atau UKM. Standar laporan tersebut dikenal dengan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. SAK EMKM adalah standar yang dibuat dan telah disahkan langsung oleh Dewan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Alasan dibuatnya SAK EMKM karena banyak pelaku bisnis UKM atau UMKM yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan yang baik. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut.



Standarisasi ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, serta membantu UMKM yang kesulitan dalam mencatat dan membuat laporan keuangan. Hal ini dijelaskan dalam kesimpulan buku SAK EMKM DK10. Entitas yang masuk dalam kriteria SAK EMKM adalah entitas yang tidak menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah

atau usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan telah memenuhi semua karakteristik yang dijelaskan di Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008. Standarisasi ini akan membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan dan memfasilitasi pertumbuhan usaha yang sedang dijalankan.

Sebuah survei dilakukan oleh peneliti pada UMKM dengan studi kasus di Dapoer Arine, sebuah usaha penyedia layanan makanan praktis yang berlokasi di Desa Balongwangon, Kabupaten Mojokerto. Meskipun usaha ini mengalami perkembangan pesat selama pandemi, namun Dapoer Arine belum memiliki standar pelaporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM dan masih menggunakan pembukuan manual, sehingga kinerja dagang mereka belum bisa diukur secara akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah dalam penyusunan laporan keuangan pada usaha Dapoer Arine di Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada usaha Dapoer Arine Mojokerto dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperoleh pemahaman akan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah sebagai aktivitas dasar yang nyata sehingga dapat mengeksplor wawasan terhadap implementasi laporan keuangan yang lebih tertata dan rapi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan pengalaman dalam pengimplementasian pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah untuk pengembangan usaha Dapoer Arine agar lebih maju.

b. Bagi Dapoer Arine

Penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman ilmu Akuntansi bagi pihak pelaku usaha tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah terhadap penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini akan menambah literatur penelitian dalam jurnal akuntansi melalui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, sehingga bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pihak Lain



Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi/rujukan dasar dalam memutuskan topik penelitian selanjutnya tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada Entitas UMKM.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan terfokus pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, sehingga peneliti akan membatasi cakupan penelitian ini. Usaha Dapoer Arine, yang terletak di Desa Balongwangon, Kabupaten Mojokerto, akan menjadi subyek dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan usaha Dapoer Arine dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah dalam satu periode mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember 2022.

